

**PERMASALAHAN DAN POTENSI
SEKTOR PERDAGANGAN INFORMAL
KHUSUSNYA PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA BANDUNG**

MAKALAH

**Disusun oleh:
LIEM BOEN HONG**

711.552 2
LIE
P.



85295 R/PTA
9.10.02.

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG, MEI 2000**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laju Urbanisasi yang menerpa kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang menyebabkan tekanan berat bagi kota-kota yang dalam banyak hal tidak siap menerima kawanan migran, yaitu antara lain:

- karena keterbatasan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan
- karena keterbatasan dalam hal menyediakan infrastruktur
- karena keterbatasan dalam kemampuan menyediakan perumahan

Hal ini menyebabkan para migran dengan cara mereka sendiri mencari peluang untuk dapat "survive" dengan mekanisme pengadaptasian yang diperoleh secara informal, baik dalam hal mencari nafkah / berdagang maupun dalam hal perumahan.

Kehadiran Sektor Informal khususnya dalam Perdagangan yaitu Pedagang Kaki Lima untuk seterusnya disebut PKL mau tidak mau menempati daerah-daerah umum (public spaces) di kota-kota besar termasuk Kota Bandung, sehingga akan mengurangi fungsi daerah umum tersebut dan banyak menimbulkan banyak permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, mengganggu ketertiban kota, kurang mengindahkan kepentingan umum, sampah, dan lain-lain yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi tatanan fisik ruang kota dan wajah arsitektur kota.

Akan tetapi disamping permasalahan tersebut diatas ada beberapa potensi yang dimiliki oleh pedagang sektor informal / PKL yang dapat digali, sehingga kedua pokok persoalan Masalah dan Potensi PKL merupakan hal yang menarik untuk diuraikan lebih lanjut.

2. Ringkasan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka selanjutnya akan diuraikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sektor perdagangan informal khususnya PKL dan menggali potensi-potensi apa yang ada pada nya sehingga

dapatlah dibuat suatu Analisa dan Rangkuman sebagai bahan pertimbangan dan masukan berharga guna menanggulangi permasalahan sektor informal yang kehadirannya telah secara integral merasuk dalam kegiatan kehidupan kota kota Indonesia, dan dapat pula dikatakan bahwa khadiran sektor ini sudah merupakan kebudayaan kota kita.

II. ARSITEKTUR KOTA : TINJAUAN UMUM

Pengertian Kota selain mencakup dimensi sosial masyarakat kota tentu tidak dapat dipisahkan dari Aspek ekonomi yang menggerakkan roda kehidupan kota dan menentukan pertumbuhan serta perkembangan kota. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan kota secara langsung akan mempengaruhi bentuk dan kualitas fisik kota, dimana selain sisi fisik muncul sisi psikis yang justru akan banyak menentukan segi kualitas lingkungan kota.

Pengertian kota tentu mencakup banyak dimensi lain lagi, yang secara keseluruhan akan menghasilkan suatu wujud fisik dan ruang kota. Bentuk fisik dan ruang kota secara terpadu akan merupakan perwujudan dari kualitas lingkungan kota yang akan memberi arti dan bobot bagi arsitektur kota tersebut.

Aspek Kualitas lingkungan kota yang diwujudkan dalam arsitektur kota dalam kurun waktu belakangan ini banyak dikritik dan disoroti oleh para pakar, yaitu bahwasanya lingkungan kota dibentuk justru untuk tidak ramah terhadap warga/manusianya. Dengan berbagai alasan dan dalih yang dikemukakan pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan dan pihak yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam menentukan wujud fisik dan ruang kota seringkali menganggap kota sebagai "Panggung" dimana masyarakat kota justru hanya bertindak sebagai pelaku yang menuruti skenario dari pemerintah/ penguasa kota (Wiedenhoeft, 1981; Cresswell, 1979; Puskharev,1978).

Adanya gejala kecendrungan dimana penanganan masalah perkotaan justru malah meniru atau malahan sering menerapkan begitu saja konsep konsep perkotaan dinegara negara naju dengan tidak mempertimbangkan kondisi dan ciri khas kota kota yang ada di Indonesia. Doxiadis (1969) telah mengingatkan kita sebagai negara berkembang untuk belajar dari kekeliruan penanganan masalah kota seperti yang telah dilakukan oleh negara naju.

Harus disadari bahwa kota bukan merupakan produk kebetulan, yang terjadi karena keputusan keputusan yang terpisah pisah dan berdiri sendiri, karena banyak pihak yangterlibat dalam perencanaan dan perancangan kota, yang masing masing memberikan keputusan rasional yang terpadu bagi kualitas lingkungan dan arsitektur kotanya.

III. SEKTOR PERDAGANGAN INFORMAL: PERMASALAHAN DAN POTENSINYA



III.1 Profil Pedagang Sektor Informal

Kehadiran para pedagang sektor informal, terutama PKL dikawasan perkotaan tidak terlepas dari permasalahan pengangguran dan kemiskinan didaerah pedesaan karena kebijakan pemerintah yang ingin mengubah negara Indonesia yang agraris menjadi negara industri.

Arus Urbanisasi , kelangkaan lapangan kerja dikota, menyebabkan sektor informallah yang terbuka menampung limpahan manusia akibat arus urbanisasi.

Secara umum ciri ciri dari pedagang sektor informal antara lain adalah:

- Pekerjaan yang digeluti mereka umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar atau tidak perlu ketrampilan khusus.
- Nilai pendapatan mereka cukup rendah apabila diukur dengan jumlah kerja yang mereka lalui dan umumnya habis untuk membeli keperluan sehari hari saja.
- Tempat usaha dantempat tinggal mereka kurang layak dan tidak memenuhi syarat kesehatan dan umumnya menempati lokasi tanah yang tidak legal, bahkan tempat tempat yang digunakan untuk umum.

III.2. Pokok Permasalahan PKL

Dari profil pedagang sektor informal khususnya PKL dapatlah diuraikan beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan keberadaannya:

- Kehadiran PKL dikota hampir selalu melanggar aturan dan norma, seperti berjualan di trotoir yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki , berjualan di taman, jembatan penyeberangan, bahkan terkadang menyita jalan raya yang seharusnya untuk kendaraan seperti yang ada dalam foto dibawah ini.

Dibawah ini beberapa foto PKL disalah satu jalan kotamadya Bandung yang selain melanggar peruntukan ruang bagi pejalan kaki, menutupi toko yang ada, selain itu tidak tertata dengan baik, yang pada akhirnya merusak wajah kota.



- Kehadiran PKL selain pelanggaran terhadap aturan dan norma menimbulkan masalah lain seperti pencemaran, sampah, mengganggu kelancaran saluran /riool kadang kadang memampatkan riool karena kegiatan mereka dilakukan pada umumnya memanfaatkan ruang diatas saluran kota.
- Kehadiran PKL juga menimbulkan efek negatif seperti yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu di jalan Cibadak dimana warga masyarakat merusak hampir seluruh peralatan dagang PKL di jalan tersebut yang dipicu oleh peristiwa yang sebenarnya sepele tetapi menimbulkan akibat yang dapat memicu keributan yang lebih besar.
- Kehadiran PKL dikota Bandung khususnya secara tidak langsung akan mempengaruhi pula tatanan fisik ruang kota dan wajah arsitektur kota yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kota yang semrawut yang tidak sesuai dengan slogan Bandung BERHIBER.

III.3. Potensi PKL

Untuk menampung kegiatan PKL sebenarnya sejak bulan Mei 1985, dikota Bandung telah dibentuk suatu wadah bagi PKL yaitu Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti disingkat KOPANTI, sebagai wadah pembinaan para PKL, yang bertujuan meningkatkan harkat, martabat dan derajat PKL.

Pembentukan KOPANTI ini juga karena adanya kesadaran bahwa meskipun PKL seringkali dianggap sebagai penyebab kesemrawuta kota tidaklah dapat dipungkiri bahwa PKL / sektor informal ini memiliki potensi antara lain:

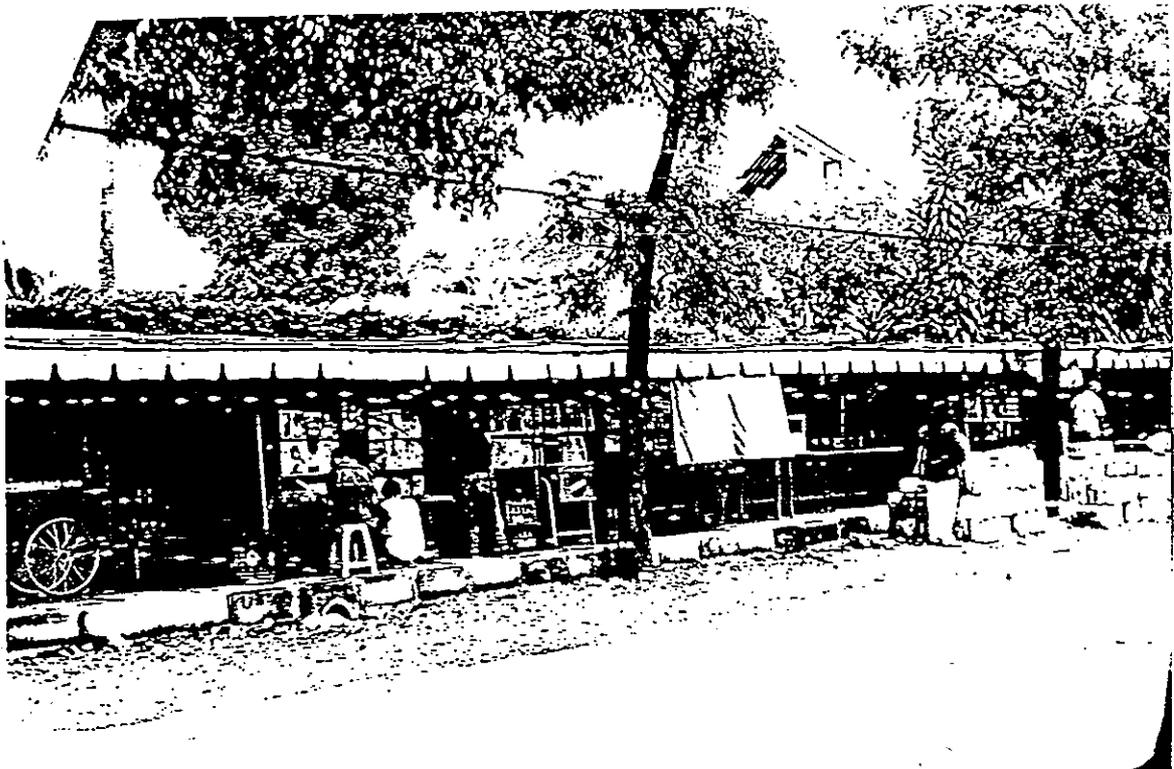
- PKL termasuk wirausaha yang mandiri, ulet, tidak mengenal musim dan tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi.
- Tidak pernah menuntut fasilitas yang berlebihan dari pemerintah, kecuali jaminan keamanan dan ketentraman untuk berdagang bagi kelangsungan hidupnya.

- Tidak memerlukan modal yang besar, ingat bahwa krisis moneter di Indonesia sebagian besar karena kredit kredit macet dari usaha yang memerlukan modal raksasa.
- Asal dirancang dengan baik PKL dapat menjadi salah satu kegiatan kota yang menarik, bahkan dapat menjadi atraksi wisata, misalnya PKL yang berdagang makanan dikelompokkan menjadi "Pusat Jajan Serba Ada", begitu pula yang lain.
- Kehadiran PKL terkadang diperlukan terutama didaerah permukiman baru yang jauh dari pusat kota.
- PKL merupakan pusat pelayanan bagi masyarakat golongan kecil yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu berbelanja ketoko atau pusat pusat perbelanjaan besar.
- PKL masih mungkin untuk dilibatkan dan diberi tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan, keindahan kota, apabila pemerintah mengambil inisiatif untuk merangkul PKL bukannya malah dengan penertiban yang selama ini sering dilakukan oleh aparat Tibum.

PKL yang menjual tanaman serta aneka ragam pot seperti ini sebenarnya akan dapat menghijaukan dan memperindah jalan kota apabila mereka diberi ruang di beberapa jalan pusat kota yang gersang. Bisakah?



PKL bisa kelihatan teratur seperti ini apabila pihak berwenang menghimbau dan membantu menata mereka, sayangnya sebagian besar ruang untuk pejalan kaki habis untuk ruang PKL. Meskipun demikian ini merupakan salah satu contoh yang cukup baik pengaturan PKL , mampukah kota Bandung menata seluruh PKL ? Apabila ya, bukan mustahil bahwa hal ini akan dapat menjadi satu proyek percontohan bagi kota kota lain dan merupakan keunikan tersendiri bagi kota kota di Indonesia pada umumnya.



IV. RANGKUMAN

Sektor Informal seperti yang telah diuraikan ternyata disamping bermasalah juga memiliki potensi yang tidak dapat diabaikan karena sektor ini mampu menyerap jumlah terbesar masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Tulisan ini tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL dikota Bandung melainkan hanya menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak baik masyarakat, pemerintah untuk bersama sama mencari jalan pemecahan terbaik untuk mengatasi permasalahan PKL.

PKL sebagai salah satu bagian sektor informal merupakan suatu mekanisme adaptasi masyarakat untuk mempertahankan hidup karena keadaan tersisihkan dalam menikmati kue pembangunan yang selama ini hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat dengan penguasa yang cenderung mengabaikan faktor pemerataan.

Dengan menemukan jalan pemecahan terbaik bagi PKL maka PKL dapat diakui keberadaannya sehingga PKL justru menjadi ciri khas / budaya yang unik bagi wajah kota di Indonesia. Semoga.

REFERENSI

1. Data teknis dari Dinas Sosial Pemkot Bandung. 2000.
2. Data teknis dari Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti (KOPANTI) Bandung.
3. Hasil survey di lapangan.